

**STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH
DENGAN MODEL AS-SYATIBI DAN IBNU KHALDUN****Al-Anshari¹, Fakhri Muhammad ArioPutra²**Universitas Muhammadiyah Jakarta¹, Universitas Muhammadiyah Jakarta²¹ alanshari192@gmail.com² fakhrimap29@gmail.com**Informasi artikel**

Diterima :

03 Mei 2025

Direvisi :

29 Mei 2025

Disetujui :

01 Juli 2025

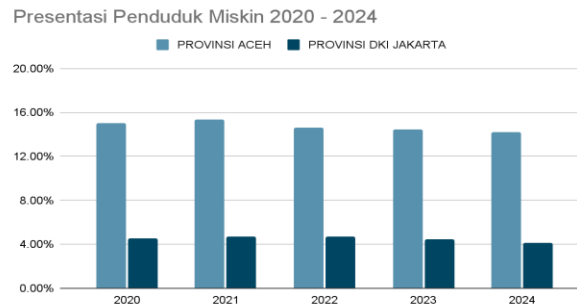
ABSTRACT

Poverty remains a fundamental issue hindering sustainable development in many regions, including Aceh Province, Indonesia. Despite various poverty alleviation programs, the poverty rate in Aceh remains high, reaching 14.23% in 2024, compared to DKI Jakarta's 4.14%. This study aims to analyze poverty alleviation strategies in Aceh by integrating the models of As-Syatibi and Ibnu Khaldun, which emphasize Islamic values and structural-economic approaches. Using a qualitative descriptive method with library research, this study examines secondary data from BPS reports, academic journals, and Islamic economic development literature. The findings suggest that a holistic strategy combining As-Syatibi's Maqashid Syariah (focusing on the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth) and Ibnu Khaldun's principles of justice, productivity, and state facilitation can effectively address poverty. Recommendations include empowering local communities through Islamic microfinance, education, skills training, and equitable resource distribution, leveraging Aceh's strong Islamic cultural identity for sustainable development.

Keywords : Aceh Province, As-Syatibi , Ibnu Khaldun, Islamic economics, Poverty Alleviation

PENDAHULUAN

Kemiskinan hingga kini masih menjadi salah satu persoalan mendasar yang menghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2022, kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek pendapatan, melainkan juga melibatkan dimensi pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap peluang ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 - 2024

Di Indonesia, meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara nasional, ketimpangan antar wilayah tetap mencolok. Provinsi Aceh, yang dikenal memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam, menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data (Statistik, 2024), persentase penduduk miskin di Aceh pada tahun 2020 tercatat sebesar 14,99%, meningkat menjadi 15,33% pada tahun 2021, dan kemudian mengalami penurunan bertahap menjadi 14,64% pada 2022, 14,45% pada 2023, dan 14,23% pada tahun 2024. Sementara itu, DKI Jakarta menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif stabil dan jauh lebih rendah, yakni 4,53% pada tahun 2020 dan menurun menjadi 4,14% pada tahun 2024. Perbedaan ini mencerminkan ketidakmerataan hasil pembangunan yang memerlukan perhatian serius.

Berbagai strategi telah diterapkan untuk mengurangi kemiskinan, mulai dari program bantuan sosial hingga pengembangan ekonomi lokal. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Todaro dan Smith (2020), pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan tidak cukup hanya melalui bantuan material, melainkan harus melibatkan transformasi struktural, pemberdayaan kapasitas manusia, dan penciptaan sistem ekonomi yang adil. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh, yang kuat berpegang pada nilai-nilai keislaman.

As-Syatibi melalui konsep Maqashid Syariah, memberikan kerangka filosofis bahwa kesejahteraan manusia dapat dicapai melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi pondasi dalam merancang program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sehat bergantung pada keadilan sosial, stabilitas pemerintahan, serta aktivitas produktif masyarakat yang berkelanjutan. Pemikiran kedua tokoh ini relevan untuk diterapkan sebagai strategi pengurangan kemiskinan berbasis nilai-nilai Islam.

Penelitian Jaharuddin *et al.* (2019) membuktikan bahwa model inkubator bisnis yang diterapkan di Universitas Muhammadiyah Jakarta mampu menghasilkan lima usaha rintisan mandiri dari kalangan mahasiswa, membuktikan bahwa pemberdayaan berbasis nilai keislaman efektif dalam menciptakan kemandirian ekonomi. Hal ini memperkuat relevansi penggunaan model berbasis Islam dalam membangun strategi pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya manusia dan nilai keagamaan yang kuat seperti Aceh.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh dengan menerapkan pemberdayaan masyarakat berdasarkan model As-Syatibi dan Ibnu Khaldun. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategi pembangunan yang tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga membangun masyarakat yang mandiri, produktif, dan berdaya saing tinggi.

KAJIAN LITERATUR

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang melibatkan tidak hanya kekurangan pendapatan, tetapi juga rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Menurut Anggara (2016), dalam studi di Jawa Timur, kemiskinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi (seperti Produk Domestik Regional Bruto/PDRB), tenaga kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mereka menemukan bahwa peningkatan IPM secara signifikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya kesempatan usaha dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup (sholeh 2010). Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi, mencakup aspek sosial, kultural, politik, dan psikologis. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya diukur dari segi pendapatan atau kekayaan, tetapi juga dari kemampuan individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta memiliki kesempatan untuk berkembang dalam masyarakat.

Pendekatan Islam terhadap kemiskinan lebih menyeluruh karena tidak hanya menyoroti aspek material tetapi juga spiritual dan sosial, berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung reduksionis (Nor, 2017). Kemiskinan biasanya diukur melalui berbagai indikator yang beragam, seperti tingkat pendapatan atau upah, pola konsumsi masyarakat, tingkat kematian bayi, cakupan vaksinasi, tingkat malnutrisi anak, tingkat fertilitas, kematian ibu, harapan hidup saat lahir, serta tingkat partisipasi dalam tenaga kerja. Selain itu, indikator lain meliputi angka pendaftaran sekolah dasar, proporsi anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan dasar, ketersediaan pangan (dilihat dari asupan kalori dan protein), akses terhadap air bersih, laju pertumbuhan penduduk, kondisi pendidikan secara nasional, tingkat urbanisasi, rata-rata pendapatan tahunan, dan distribusi pendapatan.

2. Pengangguran

Pengangguran memperburuk tingkat kemiskinan karena menurunkan daya beli masyarakat dan mengurangi akses ke kebutuhan dasar. Penelitian oleh Yuz (2015) di Kota Metro menunjukkan bahwa jumlah pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator yang mengukur capaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi: umur panjang dan sehat, pendidikan, serta standar hidup layak. Penelitian oleh Ariyaningtyas & Brodjonegoro (2015) menunjukkan bahwa IPM memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, artinya semakin tinggi IPM, semakin rendah tingkat kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), sebagaimana dijelaskan oleh Zed (2004) bahwa studi kepustakaan bertujuan untuk menghimpun teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu sebagai dasar analisis dalam memecahkan permasalahan aktual. Data yang dianalisis bersumber dari data sekunder, meliputi laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal akademik, buku-buku tentang pembangunan ekonomi Islam, serta hasil penelitian sebelumnya seperti studi Jaharuddin dan Budi Asmita (2018) yang menyoroti pentingnya pemberdayaan berbasis nilai Islam dalam mengembangkan kemandirian ekonomi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengkaji relevansi konsep pembangunan Islam menurut As-Syatibi dan Ibnu Khaldun dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Kemiskinan di Aceh

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan di Provinsi Aceh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Aceh menunjukkan angka yang cukup tinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 14,99% pada tahun 2020, naik menjadi 15,33% pada 2021, kemudian menurun secara bertahap menjadi 14,64% pada 2022, 14,45% pada 2023, dan 14,23% pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, apalagi bila dibandingkan dengan DKI Jakarta yang pada periode yang sama menunjukkan angka kemiskinan yang stabil di bawah 5%, yakni dari 4,53% pada 2020 menjadi 4,14% pada 2024.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan

Tahun	Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh	Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta
2020	14.99	4.53
2021	15.33	4.72
2022	14.64	4.69
2023	14.45	4.44
2024	14.23	4.14

Sumber : Diolah penulis

Perbedaan ini menunjukkan adanya disparitas kesejahteraan antar daerah yang mencolok. Aceh, sebagai wilayah dengan potensi sumber daya alam dan budaya keislaman yang kuat, semestinya memiliki kapasitas untuk menekan angka kemiskinan lebih optimal. Namun, tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa strategi yang selama ini dijalankan belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan. Hal ini dapat mencakup lemahnya pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, belum maksimalnya distribusi zakat produktif, serta belum terintegrasinya nilai-nilai pembangunan Islam dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.

Model Pembangunan As-Syatibi dalam Pengentasan Kemiskinan

Pemikiran As-Syatibi tentang pembangunan sangat erat kaitannya dengan konsep Maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Lima unsur utama dalam maqashid, yaitu

1. menjaga agama (*hifz al-din*)
2. jiwa (*hifz al-nafs*)
3. akal (*hifz al-'aql*)
4. keturunan (*hifz al-nasl*)

5. harta (*hifz al-mal*)

Membentuk kerangka holistik dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini tidak hanya menekankan dimensi spiritual, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi yang relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penerapan etika produksi Islami yang berlandaskan Maqashid Syariah dapat menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial (Kholil, 2025)

Dalam konteks Provinsi Aceh, maqashid syariah dapat menjadi dasar perumusan strategi yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat miskin. *Hifz al-mal* dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan wirausaha, pendampingan UMKM berbasis syariah, serta pemanfaatan zakat produktif yang tepat sasaran. *Hifz al-'aql* dan *hifz al-nafs* mendorong pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin agar mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan. Sementara itu, *hifz al-din* dan *hifz al-nasl* menekankan pentingnya pembinaan moral, stabilitas keluarga, dan integritas sosial sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya.

Penerapan Maqashid Syariah dalam strategi pengentasan kemiskinan menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima bantuan. Implementasi Maqashid Syariah dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi berkelanjutan (Fattah, 2024). Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga membangun struktur sosial-ekonomi yang kokoh dan beretika. Dengan masyarakat Aceh yang memiliki basis nilai keagamaan yang kuat, model pembangunan As-Syatibi sangat relevan untuk diterapkan sebagai fondasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang adil dan berkelanjutan.

Model Pembangunan Ibnu Khaldun sebagai Pelengkap

Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang secara khusus menyoroti hubungan antara struktur sosial, ekonomi, dan kekuasaan dalam menciptakan kemajuan peradaban. Dalam karya monumentalnya *Muqaddimah*, ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat terjadi jika terdapat keadilan, stabilitas politik, dan distribusi kekayaan yang merata. Model Ibn Khaldun ini juga telah diuji dalam penelitian empiris oleh (Affandi & Astuti, 2013), yang menemukan bahwa variabel seperti keadilan dan tata kelola pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di negara mayoritas Muslim. Bagi Ibnu Khaldun, pembangunan tidak semata diukur dari besarnya akumulasi kekayaan, melainkan dari keberdayaan masyarakat dalam menggerakkan sektor produktif dan menjalankan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Salah satu konsep penting dari Ibnu Khaldun adalah pentingnya negara sebagai fasilitator kesejahteraan, bukan hanya sebagai penguasa administratif. Negara memiliki peran dalam menjamin keadilan, mendorong perdagangan, mengembangkan keterampilan masyarakat, dan mengelola sumber daya secara efisien. Di sinilah letak signifikansi pemikirannya bagi Aceh. Pemerintah daerah tidak cukup hanya memberikan bantuan, melainkan harus aktif membuka akses terhadap sumber ekonomi bagi kelompok miskin, seperti dukungan pada petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat Aceh.

Selain itu, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa konsentrasi kekayaan yang berlebihan pada segelintir elit akan mempercepat kemunduran sosial dan memperbesar jurang kemiskinan. Oleh karena itu, mekanisme redistribusi kekayaan melalui instrumen-instrumen Islam seperti zakat, infaq, dan wakaf harus diperkuat untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Aceh sebagai daerah dengan kultur keagamaan yang kuat dan sistem Baitul Mal yang sudah berjalan, memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan distribusi sumber daya ini secara produktif.

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun dapat melengkapi model pembangunan As-Syatibi dengan menambahkan dimensi struktural dan kelembagaan yang dibutuhkan dalam

pengentasan kemiskinan. Kolaborasi antara negara, masyarakat, dan institusi keuangan sosial Islam menjadi pilar utama dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan inklusif.

Sintesis Strategi Pengentasan Kemiskinan di Aceh

Strategi pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh dapat dirumuskan melalui sintesis antara pendekatan spiritual-sosial As-Syatibi dan pendekatan struktural-ekonomi Ibnu Khaldun. Model Maqashid Syariah dari As-Syatibi menekankan pembangunan berbasis kebutuhan dasar manusia, mulai dari pemenuhan aspek material seperti ekonomi dan pendidikan, hingga aspek non-material seperti moralitas dan stabilitas keluarga. Sementara itu, Ibnu Khaldun melengkapi pendekatan tersebut dengan gagasan tentang keadilan, produktivitas, dan pentingnya negara sebagai fasilitator kesejahteraan.

Melalui integrasi kedua pendekatan ini, strategi pengentasan kemiskinan di Aceh dapat diarahkan pada penguatan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Pertama, pemerintah daerah perlu menata ulang kebijakan pembangunan ekonomi agar lebih inklusif, dengan memberi perhatian pada sektor riil seperti pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis syariah. Kedua, perlu dilakukan optimalisasi fungsi lembaga keuangan sosial Islam seperti Baitul Mal untuk mendistribusikan zakat, infaq, dan wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Ketiga, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas melalui akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan kewirausahaan Islami. Keempat, pendekatan moral dan spiritual perlu diperkuat melalui program pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai etika kerja Islami, agar masyarakat tidak hanya berdaya secara ekonomi, tetapi juga memiliki ketahanan sosial dan spiritual.

Aceh memiliki modal sosial dan budaya yang besar untuk menjalankan strategi ini. Masyarakatnya dikenal religius, kolektif, dan memiliki struktur kelembagaan keagamaan yang kuat. Dengan sinergi antara nilai Islam dan tata kelola pembangunan yang adil, strategi pengentasan kemiskinan berbasis model As-Syatibi dan Ibnu Khaldun dapat menjadi solusi jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik daerah dan aspirasi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemiskinan merupakan permasalahan struktural dan multidimensional yang masih membelenggu Provinsi Aceh meskipun berbagai program pembangunan telah diimplementasikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Aceh dalam lima tahun terakhir tetap berada di atas 14 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi DKI Jakarta yang berada di kisaran 4 persen. Ketimpangan ini menandakan bahwa pendekatan konvensional yang selama ini diterapkan belum mampu secara efektif menanggulangi akar persoalan kemiskinan di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji pendekatan alternatif yang bersifat kontekstual dan transformatif, salah satunya melalui perspektif pemikiran ekonomi Islam.

Melalui telaah terhadap model pembangunan As-Syatibi yang berorientasi pada maqashid syariah serta teori sosiologis Ibnu Khaldun yang menekankan pada keadilan, siklus sosial, dan peran negara, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat harus ditempatkan sebagai pusat strategi pengentasan kemiskinan. As-Syatibi menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok manusia dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai fondasi kesejahteraan kolektif. Sementara itu, Ibnu Khaldun menekankan bahwa peradaban dan kesejahteraan hanya dapat dibangun di atas kerja produktif, tata kelola pemerintahan yang adil, serta kesadaran moral masyarakat yang tinggi.

Hasil analisis ini memperlihatkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan di Aceh dapat diarahkan pada penguatan kapasitas individu dan kolektif masyarakat melalui pendidikan, keterampilan, penguatan ekonomi mikro, dan dukungan kebijakan yang mendorong kemandirian. Pendekatan spiritual dan moral yang melekat dalam kedua model pemikiran tersebut memberikan alternatif strategis yang relevan dalam konteks Aceh yang memiliki

identitas keislaman yang kuat. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dalam perumusan kebijakan sosial-ekonomi bukan hanya sebagai pelengkap normatif, tetapi sebagai kerangka konseptual utama yang mampu mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2020). *Manajemen Rantai Pasok Halal: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Affandi, A., & Astuti, D. P. (2013). Dynamic model of Ibn Khaldun theory on poverty Empirical analysis on the poverty in majority and minority Muslim population after the financial crisis. *Emerald*.
- Ariffin, N. M., & Nor, M. F. (2020). The Influence of Halal Supply Chain Practices on Halal Integrity Assurance: A Conceptual Framework. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1277-1292. doi:<https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2019-0006>
- Fattah, A. (2024). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN. *El-Iqtishady: Jurnal hukum ekonomi islam*, 6(2). doi:<https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.52302>
- Fauzi, H. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya terhadap Daya Saing Produk. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 12-22.
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gani, N. A., & Maulianza, M. (2024). KEPEMIMPINAN STRATEGIS: PEMIMPIN VISIONER, PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA DAN ORGANISASI ADAPTIF. *MRBEST Media Riset Ekonomi Sains dan Terapan*, 2(2), 28-37. doi:<https://doi.org/10.71312/mrbest.v2i2.170>
- Jaharuddin, J. (2022). Analisis Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon Perspektif Model Pembangunan As-Syatibi dan Ibnu Khaldun. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 348-396. doi:<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4096>
- Jaharuddin, J., & Asmita, B. (2018). Pembekalan Generasi Muda Muslim untuk Menjadi Wirausaha dengan Pendekatan Inkubator Bisnis Islami di STIE BI Ciputat, Tangerang Selatan. *Jurnal Cemerlang: Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 12-25. doi:<https://doi.org/10.31540/jpm.v1i1.157>
- Jaharuddin, J., Purnawan, I., Mujiastuti, R., Muthmainnah, R. N., & Prasetyawati, M. (2019). Pembentukan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa Melalui Program Wirausaha Mahasiswa Mandiri. *Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis*, 24(13). doi:<https://doi.org/10.20961/jkb.v24i13.29310>
- Kholil, S. (2025). ETIKA PRODUKSI ISLAMI BERBASIS MAQASHID AL-SHARIAH: PILAR KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI. *Equality: Journal of Islamic Law*, 3(1). doi:<https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>
- Nasution, M. D., & Rafiki, A. (2020). The Impact of Halal Certification, Product Quality, and Marketing on Business Performance. *Journal of Islamic Business and Management*, 10(2), 273-289.
- Nor, R. M. (2017). PERBANDINGAN TENTANG KONSEP KEMISKINAN PENDEKATAN KONVENSIONAL DAN ISLAM. *Jurnal Kemanusiaan*, 11(1).
- Sari, M., & Yuliani, R. (2021). Strategi Peningkatan Kinerja Bisnis Restoran Halal Melalui Implementasi Sertifikasi Halal. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 9(3), 221-231.
- Statistik, B. P. (2024). *Presentasi Penduduk Miskin 2020 - 2024*.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, A., & Maulana, T. (2021). The Role of Halal Quality Assurance in Enhancing Consumer Trust. *Halal Journal of Indonesia*, 2(1), 35-47.